



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

### AMNESTY INTERNATIONAL -JSMP PERNYATAAN PUBLIK

ASA 57/001/2011  
17 Februari 2011

#### **Timor-Leste: Parlemen kehilangan kesempatan untuk memberikan keadilan bagi kejahatan masa lalu**

Amnesty International dan Program Pemantauan Sistem Yudisial (The Judicial System Monitoring Programme-JSMP) mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Parlemen Timor-Leste untuk menunda perdebatan atas dua undang-undang untuk merespon pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Dua organisasi tersebut bertemu dengan anggota Komisi A Parlemen Nasional, yang memiliki mandat untuk membidangi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keadilan, untuk mendiskusikan pemunggutan suara yang dilakukan pada hari Senin, yang mana sekali lagi menunda perdebatan mengenai rancangan undang-undang untuk menetapkan program reparasi nasional dan mendirikan sebuah "Institusi Memorial". Pemunggutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2011, yang mana 20 orang memilih memilih untuk menunda, 9 orang menentang dan 10 orang abstain. Jumlah kursi di Parlemen Nasional Timor Leste adalah 65 kursi

Perdebatan dan pengesahan dua undang-undang tersebut merupakan langkah penting dalam mengimplementasi rekomendasi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF). Selama beberapa tahun, kelompok masyarakat sipil dan korban di Timor-Leste yang telah meminta keadilan dan reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pendudukan Indonesia antara tahun 1975 dan 1999. Dengan terus adanya penundaan diskusi terhadap dua rancangan undang-undang tersebut, maka Parlemen telah kehilangan kesempatan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste .

Amnesty International dan JSMP mendesak Parlemen Nasional untuk berhenti melakukan penundaan perdebatan dan menerapkan undang-undang yang telah lama tertunda, dan untuk berkomitmen untuk menjamin keadilan, reparasi dan keadilan bagi korban pelanggaran masa lalu.

Selama pertemuan dengan anggota Parlemen, Amnesty International dan JSMP menyampaikan keprihatinan terhadap ketidaksesuaian antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, yang telah diratifikasi oleh Timor-Leste sejak 2002.

Pada bulan Juli 2010, Komisi A yang diberikan mandat untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keadilan, mengesahkan rekomendasi untuk menetapkan program reparasi nasional dan sebuah “Institusi Memorial”. Rancangan undang-undang itu dijadwalkan untuk dilakukan perdebatan oleh Parlemen pada bulan September 2010, akan tetapi perdebatan tersebut ditunda sampai bulan Februari 2011.

Kelompok Kerja mengenai Penghilangan Paksa *The UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances (WGEID)* yang berkunjung di Timor-Leste dari tanggal 7 sampai 14 Februari 2011 menyatakan kembali pentingnya implementasi rekomendasi CAVR dan CTF. Kelompok tersebut berharap untuk didirikannya *Institusi Memorial* yang akan memfasilitasi implementasi rekomendasi yang dibuat oleh kedua Komisi.

Pada laporan CAVR 2005 memperkirakan bahwa lebih dari 100.0000 orang yang terbunuh atau mati kelaparan antara tahun 1974 dan 1999 sebagai akibat dari konflik tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste, waktu itu Timor-Timur. Kejahatan tersebut termasuk pembunuhan illegal, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk; kejahatan perang, kekerasan seksual, pelanggaran hak-hak anak; dan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mayoritas dari kejahatan ini belum ditangani.

Pada tahun 2010 Amnesty Internasional meluncurkan sebuah laporan mengenai “Pengadilan Pidana Internasional: Timor-Leste - Keadilan dalam bayangan (Index: ASA 57/001/2010).

ENDS/

Dokumen

Publik

\*\*\*\*\*

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, <http://www.amnesty.org>  
For latest human rights news view <http://news.amnesty.org>